

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian

2.1.1 Tinjauan tentang Peran

2.1.1.1 Definisi Peran

Syamsir (dalam Afilaily, 2022) menjelaskan bahwa peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran dan peranan memiliki perbedaan, dimana peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Perbedaan ini menekankan bahwa peran adalah konsep yang lebih abstrak, sedangkan peranan adalah manifestasi konkret dari peran tersebut.

Soerjono Soekanto (dalam Afilaily, 2022) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang. Ketika individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, ia sedang menjalankan peran tersebut. Sementara itu, kewajiban mencakup semua hal yang harus dilakukan oleh individu dalam kehidupannya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu situasi.

Maka, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peran dapat dipahami sebagai ekspektasi dan tanggung jawab yang melekat pada individu berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran dinamis bersifat dan

mencerminkan hubungan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perbedaan antara peran dan peranan menunjukkan bahwa peran adalah konsep yang lebih abstrak, sedangkan peranan adalah implementasi nyata dalam tindakan sehari-hari. Dengan memahami konsep peran secara mendalam, dapat membantu mengeksplorasi interaksi sosial dan peran individu dengan lebih baik dalam berbagai situasi, yang membantu menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

2.1.1.2 Komponen peran

Sutarto (dalam Brigitte Lantaeda et al., 2017) mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran sosial terdiri dari tiga komponen utama: konsepsi peran, harapan peran, dan pelaksanaan peran. Konsepsi peran adalah pemahaman individu tentang tindakan yang tepat dalam situasi tertentu. Harapan peran adalah ekspektasi orang lain terhadap bagaimana individu seharusnya bertindak dalam posisinya. Sementara itu, pelaksanaan peran adalah tindakan nyata yang dilakukan individu sambil terus melakukannya. Ketiga

komponen ini perlu berjalan bersama agar interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik dan harmonis.

2.1.1.3 Jenis Peran

Berdasarkan Soekanto (dalam Brigitte Lantaeda et al., 2017), peran dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Klasifikasi ini menyediakan kerangka untuk memahami berbagai dimensi peran dalam konteks sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai kategori peran menurut Soekanto, dapat disimpulkan bahwa peran dalam konteks sosial sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Klasifikasi menjadi peran aktif, partisipatif, dan pasif memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu berkontribusi dalam kelompok. Peran aktif menunjukkan keterlibatan langsung dalam kegiatan kelompok, sementara peran partisipatif menonjolkan kontribusi yang bermanfaat bagi kelompok secara keseluruhan. Di sisi lain, peran pasif berfungsi untuk mendukung dinamika kelompok dengan memberikan ruang bagi fungsi lainnya.

Pemahaman tentang ketiga jenis peran ini penting untuk menciptakan interaksi yang harmonis dan efektif dalam kelompok sosial.

2.1.1.4 Peran Pekerja Sosial

Berdasarkan pendapat Jim Ife (dalam Ife, Jim, 2016) membahas mengenai peran-peran pekerja sosial, meliputi hal-hal dibawah ini:

1) Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif mengandung tujuan untuk memberikan dorongan semangat atau membangkitkan semangat kelompok sasaran atau klien, agar sasaran dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya. Peran ini meliputi semangat sosial (memberi semangat atau mengaktifkan), mediasi dan negosiasi (menengahi dan menghubungkan), dukungan (mendorong), membangun konsensus (membangun kesepakatan), fasilitasi kelompok (memfasilitasi atau memperlancar kelompok), pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya (penggunaan keterampilan dan sumber – sumber), mengorganisasi (mengatur), dan komunikasi pribadi (membangun kedekatan).

2) Peran Edukasional

Peran edukasional ini melibatkan peran aktif pekerja sosial dalam proses pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan bersama kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam konteks ini dapat diwujudkan berupa pelatihan-pelatihan keterampilan, misalnya: pelatihan tata cara pengambilan keputusan, dan pelatihan pemanfaatan waktu luang yang dimiliki. Peran ini meliputi peningkatan kesadaran (membangun kesadaran), memberikan informasi (memberi penjelasan), konfrontasi (mempertentangkan sebagai dinamisasi kelompok) dan pelatihan (pelatihan).

3) Peran representasi

Peran representasi pekerja sosial ini yaitu bertindak sebagai enabler atau sebagai agen perubahan, antara lain membantu klien menyadari kondisi hidupnya, mengembangkan relasi klien untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain (*networking*) dan membantu klien membuat suatu perencanaan. Peran ini meliputi advokasi (mewakili kepentingan klien), menggunakan media (memanfaatkan sebuah media), humas dan presentasi publik (membangun dan menyampaikan kesan positif), dan berbagi pengetahuan dan pengalaman (berbagi pengalaman).

4) Peran teknikal

Peran teknikal ini adalah pekerja sosial melakukan penelitian, menggunakan komputer, presentasi verbal dan tertulis, manajemen, dan pengaturan keuangan.

Adapun pendapat lain dari ahli, yaitu Zastrow (2015), menjelaskan bahwa terdapat tujuh peranan yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial profesional, diantaranya yaitu:

1) *Enabler*

Pekerja sosial dalam peran pemungkin berfungsi sebagai fasilitator untuk klien mereka. Mereka membantu klien mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, kemudian bersama-sama mengembangkan strategi penyelesaian. Proses ini melibatkan pemilihan dan penerapan pendekatan yang paling sesuai, sambil mendorong klien untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Tujuannya adalah memberdayakan klien agar dapat mengatasi tantangan secara efektif.

2) *Broker*

Sebagai perantara, pekerja sosial membantu klien untuk terhubung dengan

sumber-sumber layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. peran pekerja sosial sebagai broker sangat penting dalam memastikan klien mendapatkan akses yang tepat dan efektif terhadap layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

3) *Activist*

Sebagai seorang aktivis, pekerja sosial berperan sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Mereka peduli terhadap ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan, eksploitasi, serta menggunakan strategi seperti konflik, konfrontasi, dan negosiasi. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memperbaiki lingkungan sosial dan memenuhi kebutuhan individu yang diakui.

4) *Mediator*

Peran pekerja sosial sebagai mediator melibatkan intervensi dalam konflik antara pihak-pihak yang bertikai untuk membantu mereka mencapai kesepakatan bersama melalui perjanjian. Sebagai mediator, pekerja sosial tetap netral, tidak memihak kepada salah satu pihak, dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami posisi masing-masing. Membantu pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjelaskan atau menyampaikan kasus mereka dengan jelas.

5) *Negotiator*

Sebagai negosiator, pekerja sosial menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terkait satu atau lebih masalah, dan berupaya untuk menegosiasikan serta mencapai kompromi agar dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak melalui perjanjian. Disini pekerja sosial membantu menciptakan suasana dialog yang konstruktif, sehingga semua pihak merasa dihargai.

6) *Educator*

Sebagai pendidik, pekerja sosial perlu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada klien agar mereka dapat berinteraksi secara sosial dan memenuhi kebutuhan mereka. Peran pekerja sosial sebagai pendidik sangat krusial dalam memberdayakan klien untuk mengembangkan kemampuan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

7) *Advocate*

Sebagai pembela, pekerja sosial selalu bertindak sebagai perwakilan yang membela kepentingan klien. Peran pekerja sosial sebagai advokat sangat penting dalam memastikan suara klien didengar dan hak-hak mereka terlindungi, serta membantu mereka mendapatkan akses yang adil terhadap layanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan dua ahli terkait peranan pekerja sosial di atas, peneliti memilih satu teori peranan pekerja sosial yang akan digunakan dalam penelitian ini. Konsep peran pekerja sosial menurut Jim Ife (dalam Ife, Jim, 2016) dalam buku *community development* lebih cocok digunakan dalam penelitian ini, karena mencakup aspek-aspek penting yang relevan dengan program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi. Peran fasilitatif dapat membangkitkan semangat dan motivasi perempuan untuk berpartisipasi, serta memperoleh sumber daya yang diperlukan. Peran pendidikan dapat mendukung pengajaran pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Peran representatif membantu mewakili suara kelompok dan menghubungkan dengan sumber yang diperlukan. Peran teknis membantu mengetahui pengumpulan dan analisis data, penyajian laporan, serta manajemen,

sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan dengan optimal. Kombinasi semua peran ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami kontribusi pekerja sosial dalam program pelatihan kewirausahaan bagi PRSE di Kecamatan Antapani Kota Bandung.

2.1.2 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

2.1.2.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Charles Zastrow (dalam Sukoco, 2021) menjelaskan: *Social work is professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.* Arti dari kutipan tersebut, Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya.

Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte (dalam Sukoco, 2021) mengatakan bahwa: *Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relations, which help individuals, group, or communities obtain social or personal satisfaction and independence.* Definisi tersebut menyatakan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang praktiknya di dasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pekerja sosial adalah individu yang menjalankan pekerjaan sosial. Pekerja sosial adalah profesional yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi dalam memberikan bantuan serta intervensi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pekerja sosial dapat bekerja di berbagai sektor, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), rumah sakit, panti sosial, dan lembaga pendidikan.

Berdasarkan para pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang praktiknya di dasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia. Selain itu, memberikan gambaran yang komprehensif tentang pekerjaan sosial sebagai profesi yang membantu orang lain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan seorang pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Pekerja sosial juga berperan sebagai agen perubahan untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih sejahtera dalam membantu permasalahan hidup individu, kelompok maupun komunitas.

2.1.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pincus dan Minahan (dalam Sukoco, 2021) mengungkapkan bahwa Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilainya.

Berdasarkan uraian tugas diatas, maka tujuan profesi pekerjaan sosial pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi dan memecahkan masalah (*enhance the problem solving and coping capacities of people*).
2. Mengaitkan orang dengan sistem-sistem yang menyediakan bagi mereka sumber, pelayanan, dan kesempatan (*link people with system that provide them with resourses, service, and opportunities*).
3. Mengupayakan agar sistem-sitem tersebut dilaksanakan secara manusiawi dan efektif (*promote the effective and human operation of these systems*).
4. Memberikan sumbangan untuk perkembangan dan perbaikan kebijakan sosial (*contribute to the development and operation of these systems*).

Maka dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran multidimensi untuk membantu individu, keluarga, dan komunitas mencapai kesejahteraan, dengan meningkatkan kemampuannya, menghubungkan mereka dengan sumber daya, memperjuangkan keadilan sosial, dan mengembangkan praktik yang efektif dalam berbagai konteks budaya. Pekerja sosial berfungsi sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi individu dan komunitas. Peneliti akan menggambarkan peran pekerja sosial dalam program pelatihan kewirausahaan bagi PRSE, sehingga PRSE dapat berdaya dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2.1.3 Tinjauan tentang Program Pelatihan Kewirausahaan

2.1.3.1 Definisi Program

(Wibowo, 2020) menjelaskan “Program adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu dan biasanya melibatkan sumber daya yang signifikan.” Definisi ini menekankan bahwa program terdiri dari beberapa kegiatan atau tindakan yang saling berkaitan. Aktivitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu rencana yang lebih besar. Setiap aktivitas dalam program memiliki tujuan dan kontribusi tertentu untuk mencapai hasil akhir. Program tidak hanya sekadar kumpulan aktivitas, tetapi setiap aktivitas tersebut dirancang dengan tujuan yang jelas. Hasil tertentu yang dimaksud bisa berupa pencapaian tujuan jangka pendek atau jangka panjang, seperti peningkatan keterampilan, penyediaan layanan, atau pencapaian target tertentu dalam suatu proyek. Maka, program memiliki arah dan fokus yang jelas. Pelaksanaan program, diperlukan berbagai sumber daya, seperti tenaga kerja, dana, waktu, dan material. Penggunaan sumber daya ini harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar program dapat berjalan efektif dan efisien.

2.1.3.2 Definisi Pelatihan

(Hartono Tommy & Siagian Mauli, 2020) menjelaskan bahwa pelatihan adalah suatu cara untuk melatih keterampilan, kemudian akan diberikan masukan dengan cara yang maksimal agar tercapainya tujuan yang diharapkan perusahaan secara maksimal juga. Meidita, (2019) mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan untuk membentuk atau membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan dan perilaku agar perilaku karyawan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. sedangkan, Subroto, (2018: 20)

menjelaskan juga terkait pelatihan (*training*) yaitu suatu kegiatan untuk memperbaiki keterampilan kerja karyawan yang berguna untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai pelatihan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu kegiatan yang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku individu agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelatihan sangat penting untuk memberdayakan keterampilan kewirausahaan agar PRSE mampu meningkatkan taraf hidup, pendapatan, dan memiliki kesempatan yang sama dalam akses mendapatkan pekerjaan yang layak karena memiliki bekal keterampilan. Pelatihan ini berfungsi untuk mengembangkan keahlian dalam menjalankan usaha, dan berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

2.1.3.3 Definisi Kewirausahaan

Peter F. Drucker (dalam Sukmadi, 2016), menjelaskan bahwa kewirausahaan merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan yang inovatif kedalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga melibatkan aspek mental dan motivasi yang diperlukan untuk mengembangkan ide secara efektif. Maka, keberhasilan dalam kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen individu dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyatakan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang bertujuan pada upaya mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, serta produk baru untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan. Maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan bukan sekadar keterampilan teknis dalam menjalankan usaha, tetapi juga melibatkan sikap, semangat, dan komitmen dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang. Dalam konteks program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi, pemahaman tentang kewirausahaan ini menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana individu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

2.1.3.4 Program Pelatihan Kewirausahaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pada Pasal 12 Ayat 3, diatur mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pasal 12 Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial bagi individu atau kelompok yang mengalami ketidakberdayaan, termasuk dalam membantu mereka agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial.

Program pelatihan kewirausahaan ini merupakan program dari Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai salah satu langkah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Bandung. Melalui program pelatihan

kewirausahaan yang dilakukan diharapkan masyarakat dapat terbantu dan keluar dari angka kemiskinan yang ada. Seperti halnya tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Kecamatan Antapani dengan adanya reses dari DPRD, Kota Bandung mengajukan untuk diadakannya pelatihan untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang tercatat di DTKS Kecamatan Antapani untuk memiliki keterampilan dan mendapatkan peningkatan pendapatan.

2.1.3.5 Tujuan dan Manfaat Program Pelatihan Kewirausahaan bagi PRSE

Pelatihan kewirausahaan bagi (PRSE) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian sosialnya melalui penguasaan keterampilan kewirausahaan. Program ini juga berfungsi sebagai strategi pemberdayaan sosial agar PRSE dapat keluar dari keterbatasan ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

Zimmerer, Scarborough, & Wilson (2008), memaparkan bahwa tujuan utama dari pelatihan kewirausahaan adalah:

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis.
2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
3. Mendorong kemandirian ekonomi.
4. Meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi.
5. Memperbaiki keberfungsian sosial.

Hisrich, Peters, & Shepherd (2017), menjelaskan bahwa manfaat dari pelatihan kewirausahaan meliputi:

1. Meningkatkan keterampilan praktis.
2. Membangun jaringan sosial dan ekonomi.

3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
4. Meningkatkan kepercayaan diri.
5. Menciptakan dampak sosial positif.

Program ini berfungsi sebagai cara pemberdayaan sosial untuk membantu PRSE keluar dari keterbatasan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Tujuan pelatihan adalah peningkatan keterampilan tata rias, penumbuhan jiwa kewirausahaan, dan dorongan kemandirian ekonomi. Manfaatnya peningkatan keterampilan praktis, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kepercayaan diri, dan terciptanya dampak sosial positif.

2.1.3.6 Faktor Keberhasilan

Keberhasilan program pelatihan kewirausahaan bagi PRSE dapat dinilai dari sejumlah indikator yang relevan, yang mencakup peningkatan keterampilan, akses terhadap modal, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan usaha. Hisrich, Peters, & Shepherd (2017), menjelaskan bahwa pelatihan yang berhasil harus mampu mengembangkan keterampilan praktis dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha. Hal ini terlihat jelas pada PRSE yang mampu memperoleh keterampilan yang relevan dan dapat langsung mengaplikasikannya dalam usahanya. G. Richard Locke (2016), mengungkapkan bahwasanya salah satu indikator utama dari keberhasilan program pelatihan kewirausahaan adalah kemampuan PRSE untuk menjadi mandiri secara ekonomi setelah mengikuti pelatihan. Jika PRSE dapat meningkatkan pendapatannya dan mengelola usaha dengan baik, ini adalah bukti nyata bahwa PRSE telah mendapatkan manfaat yang signifikan dari pelatihan tersebut.

Maka, program pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) ini memiliki dampak positif yang signifikan. Hal ini diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan keterampilan, akses terhadap modal, peningkatan pendapatan, ketergantungan ekonomi, dan penghentian usaha. Pekerja sosial berkontribusi dalam perannya sebagai fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknis. Maka, pekerja sosial dapat membantu PRSE mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

2.1.4 Tinjauan tentang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

2.1.4.1 Definisi

Ihroni (dalam Nurmiati & Sumardhani, 2023) menyatakan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah perempuan dalam keluarga dengan penghasilan rendah memiliki keterbatasan untuk meningkatkan derajat kesehatan diri dan keluarganya, mereka sering kali harus menghabiskan waktu lebih untuk mencari penghasilan tambahan, dan mengalami kesulitan karena pendidikan terbatas, situasi semakin diperparah bila perempuan tersebut menjadi kepala keluarga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PRSE merupakan kelompok rentan yang menghadapi kerentanan, baik secara ekonomi maupun sosial. Kondisi penghasilan rendah, rendahnya pendidikan, serta beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga menjadikan posisi mereka semakin lemah. Situasi ini menuntut adanya intervensi yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, kesehatan, dan pemberdayaan agar PRSE mampu meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah “Seorang perempuan dewasa berusia 18 sampai 59 tahun, menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah perempuan dewasa berusia 18 sampai 59 tahun yang dalam keadaan belum menikah, sudah menikah, ataupun janda, baik karena cerai atau karena meninggalnya pasangan yang memiliki faktor-faktor lain yang membuat kebutuhan sehari-hari PRSE kurang tercukupi yang kemudian menimbulkan berbagai kerentanan, yaitu perempuan atau istri sebagai seorang janda karena suami telah meninggal atau telah bercerai dengan suaminya akan menggantikan posisi seorang suami yaitu sebagai kepala keluarga dan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Selain itu, jika seorang wanita belum menikah namun dirinya menjadi tulang punggung keluarga karena orangtuanya telah meninggal juga dapat dikategorikan ke dalam kategori PRSE.

Definisi ini menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi menjadi faktor utama, terlepas dari status perkawinan atau batasan usia. Sebagai kelompok rentan, PRSE menjadi sasaran program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2.1.4.2 Indikator Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), menjelaskan bahwa individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya hingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar disebut sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kondisi ini mencakup aspek fisik, mental, maupun sosial. Salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori ini adalah PRSE, yaitu perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil dan memerlukan perhatian khusus pada aspek kesejahteraan sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

Indikator dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.
2. Istri yang ditinggal suami baik ditinggal mati atau ditinggal tanpa kejelasan.
3. Pencari nafkah utama keluarga.
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat diketahui bahwa tanpa modal, tanpa pendidikan, tanpa keterampilan, PRSE akan kesulitan memperbaiki kondisi kehidupannya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Maka, semakin jelas bahwa yang dinamakan PRSE adalah perempuan yang dilatarbelakangi oleh kehilangan suami atau bisa karena gaji suami yang kecil, tidak mendapat kesempatan dalam lapangan pekerjaan, beban dan tanggung jawab yang cukup berat untuk menghidupi keluarga tanpa persiapan yang matang, memiliki penghasilan yang kurang atau tidak mencukupi serta tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki. Perempuan yang menghadapi hal tersebut membutuhkan dukungan dan kebijakan yang khusus untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.1.4.3 Masalah dan Kebutuhan

Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) adalah kelompok yang sering terabaikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2020), menjelaskan bahwa perempuan dalam kategori ini menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pendidikan, keterbatasan peluang kerja, dan minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini membuat PRSE terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diatasi, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi PRSE adalah ketidakberdayaan ekonomi. Banyak PRSE yang tidak memiliki akses ke modal usaha atau pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup. Hisrich, Peters, & Shepherd (2017), menjelaskan salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan kewirausahaan adalah kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama modal. Tanpa modal yang cukup, PRSE kesulitan memulai atau mengembangkan usaha, sehingga memperburuk kondisi ekonominya.

Kebutuhan akan program-program yang mendukung PRSE sangat mendesak. Inisiatif seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan layanan kesehatan yang ramah perempuan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kondisi kehidupan PRSE. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi juga perlu ditingkatkan. Maka, upaya untuk memberdayakan PRSE tidak hanya akan

meningkatkan kualitas hidup PRSE, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

2.1.4.4 Faktor Penyebab

Yoke Pradila *et al* (dalam Wijaya, 2024) faktor-faktor penyebab terjadinya Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Mereka harus menjadi kepala rumah tangga (Tulang Punggung).
2. Tingkat pendidikan.
3. Rasa kurang percaya diri, apatis, rendah diri serta aspirasi material yang tinggi.
4. Keterbatasan akses terhadap pekerjaan, dan kekerabatan yang mendukungnya.

Disimpulkan bahwa perempuan yang berada dalam kondisi rawan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Peran sebagai kepala rumah tangga sering kali menambah beban ekonomi yang harus ditanggung. Tingkat pendidikan yang rendah menghambat akses mereka terhadap peluang kerja yang lebih baik. Selain itu, faktor psikologis seperti kurang rasa percaya diri dan aspirasi materi yang tinggi juga berkontribusi pada kondisi ini. Terakhir, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang semakin memperparah situasi mereka. Oleh karena itu, penting adanya suatu intervensi untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang dialami mereka.